

PENGARUH KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN RODA DUA DI KOTA JAKARTA

Mawar Damayanti¹, Eduward Tony Sitorus², Rina Dameria Napitupulu³, Maralus Samosir⁴
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

Tax is an essential instrument in supporting national and regional finances, particularly to fund national development and public services. The Motor Vehicle Tax (PKB) in Jakarta serves as a significant source of Regional Original Revenue (PAD). Despite the rapid increase in the number of two-wheeled vehicles, taxpayer compliance remains low, averaging only 47.26%. This study aims to analyze the influence of road infrastructure quality and tax service quality on the compliance of two-wheeled vehicle taxpayers in Jakarta. A quantitative approach was employed using a survey method, with questionnaires distributed to 100 respondents selected through purposive sampling. The results indicate that road infrastructure quality has no significant effect on compliance, whereas tax service quality has a positive and significant effect. Simultaneous F-tests show that both variables jointly have a significant influence on compliance, contributing 26.8% to the variation in compliance. These findings imply that while infrastructure improvements are important, enhancing tax service quality, transparency, and public education is more effective in promoting taxpayer compliance. A strategy combining excellent service with effective public communication about the benefits of taxes has the potential to foster a sustainable culture of tax compliance within the community.

Keywords: Road infrastructure, tax service, taxpayer compliance, motor vehicle tax.

ABSTRAK

Pajak merupakan instrumen penting dalam mendukung keuangan negara dan daerah, khususnya untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Jakarta menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Meskipun jumlah kendaraan roda dua terus meningkat, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, rata-rata hanya 47,26%. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas infrastruktur jalan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei kuesioner kepada 100 responden yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan. Uji simultan (F) mengindikasikan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan kontribusi 26,8% terhadap variasi kepatuhan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa meskipun perbaikan infrastruktur penting, peningkatan kualitas pelayanan pajak, transparansi, dan edukasi publik lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Strategi yang mengintegrasikan pelayanan prima dan komunikasi publik mengenai manfaat pajak berpotensi menciptakan budaya patuh pajak yang berkelanjutan di masyarakat.

Kata kunci: Infrastruktur jalan, pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor.

Korespondensi: Mawar Damayanti, S.Ak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jl Salemba Raya No 24 10430
stie@jayakarta.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam mendukung keuangan negara dan daerah, terutama untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dalam konteks daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Di Kota Jakarta, jumlah kendaraan roda dua meningkat pesat, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dengan rata-rata hanya 47,26%. Hal ini menjadi ironi karena penerimaan pajak sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi infrastruktur jalan dan kualitas pelayanan pajak. Infrastruktur jalan yang baik meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap manfaat pajak, sementara pelayanan pajak yang cepat, transparan, dan mudah diakses berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Data dan Target Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi Pajak	Persentase Realisasi
2020	8,00	7,87	98%
2021	8,80	8,53	97%
2022	9,40	9,40	100%
2023	9,60	9,41	98%
2024	9,70	9,65	99%

Diolah Peneliti (2025)

Data menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan PKB di Jakarta cukup tinggi 97–100%, masih ada celah untuk peningkatan kepatuhan. Sebagian wilayah masih memiliki jalan dalam kondisi rusak, yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan pajak. Di sisi lain, inovasi layanan seperti Samsat *Drive Thru* dan E-Samsat belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat, yang menunjukkan perlunya evaluasi dalam penyampaian layanan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kualitas infrastruktur jalan dan pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta, guna memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan perpajakan daerah.

II. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen vital dalam sistem transportasi dan pembangunan nasional yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas, serta memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas umum.

Kota Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan infrastrukturnya. Tingginya volume kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan dan mempercepat kerusakan jalan. (Mahasyahputra et al., 2023) menemukan bahwa 36% jalan di Jakarta mengalami degradasi kualitas akibat beban berlebih, kurangnya pemeliharaan rutin, dan genangan air saat musim hujan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan baru tidak selalu sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan dan perubahan fungsi tata ruang kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, kualitas jalan diukur dari empat aspek utama, yaitu:

1. Kualitas Jalan, seperti permukaan jalan yang rata dan tidak cepat rusak.
2. Keamanan Jalan, ditandai dengan rambu lalu lintas, penerangan yang memadai, serta marka jalan yang jelas.
3. Kenyamanan Jalan, terkait dengan kelancaran lalu lintas dan minimnya guncangan.
4. Efektivitas Jaringan Jalan, yaitu kemampuannya menghubungkan pusat-pusat kegiatan serta menghemat waktu tempuh antarwilayah.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan persepsi wajib pajak terhadap sejauh mana pelayanan yang diterima mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan mereka. Menurut (Laila Fatikhatul Ula, Dian Kusuma Wardani, 2021), pelayanan pajak adalah proses membantu, mengurus, dan menyiapkan segala kebutuhan wajib pajak secara profesional dan terstruktur.

Pelayanan pajak yang berkualitas harus mencakup kompetensi teknis petugas, penggunaan teknologi informasi, serta fasilitas pelayanan yang memadai. Hal ini bertujuan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien. Dengan demikian, kualitas pelayanan bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan, kenyamanan, dan hubungan emosional antara

pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pajak daerah, pelayanan yang baik dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (Ridhawati et al., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut (Manrejo, 2023), kepatuhan membayar pajak mencakup pembayaran, pelaporan, dan pengisian data secara benar, tepat waktu, dan tanpa paksaan. Dalam *sistem self-assessment* seperti di Indonesia, kepatuhan menjadi kunci keberhasilan pemungutan pajak.

Berbagai faktor memengaruhi kepatuhan, antara lain pemahaman pajak, kualitas layanan, sikap terhadap hukum, tingkat pendidikan, dan kepercayaan pada pemerintah (Arif Sulisty Wibowo, Siti Nurlaela, 2022). Selain itu, kesadaran wajib pajak berperan penting, mencakup pemahaman fungsi pajak, motivasi membayar secara sukarela, dan kebiasaan membayar tanpa paksaan (Syawali & Machdar, 2024).

Indikator kepatuhan mencakup: ketepatan waktu, kebenaran pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan, kesadaran membayar, dan kelengkapan administrasi (Manrejo, 2023).

Hubungan Infrastruktur dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak

Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan kemudahan akses masyarakat menuju tempat pembayaran pajak, seperti kantor Samsat, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Jalan yang rusak atau tidak memadai sering menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tepat waktu.

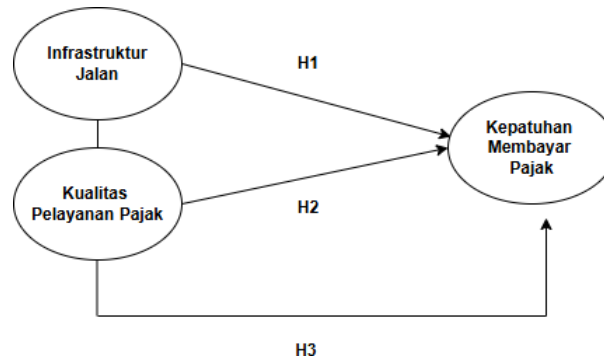
Sementara itu, kualitas pelayanan pajak juga memengaruhi kepatuhan. Pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan berbasis teknologi mampu meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Menurut berbagai penelitian (Damayanti, 2022) semakin baik pelayanan yang diterima, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Tabel 2. Deskripsi Operasional Variabel

Variabel	Skala Likert	Jumlah Pertanyaan	Teori
X1 Kualitas Infrastruktur Jalan	1-5	12	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Ula et al. 2021 Sumarno Manrejo 2023
X2 Kualitas Pelayanan Pajak	1-5	10	
Y Kepatuhan Membayar Pajak	1-5	10	

Diolah Peneliti (2025)





Diolah Peneliti (2025)

1. Variabel X (Independen/Pengaruh):
 - a. Infrastruktur Jalan.
 - b. Kualitas Pelayanan Pajak.
2. Variabel Y (Dependen/Respon) yaitu, Kepatuhan Membayar Pajak.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H1: Kualitas Infrastruktur Jalan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta.
2. H2: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta.
3. H3: Kualitas Infrastruktur Jalan dan Kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *survei* melalui penyebaran kuesioner secara *online* menggunakan *Google Forms*. Objek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor Samsat wilayah Kota Jakarta.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak kendaraan roda dua di Jakarta. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* digunakan, dengan kriteria usia 19–45 tahun, berdomisili di Jakarta, dan telah membayar pajak kendaraan minimal satu kali dalam dua tahun terakhir.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Lemeshow*, sehingga diperoleh total 100 responden. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan dianalisis secara statistik menggunakan SPSS versi 22.

Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap kualitas infrastruktur jalan, pelayanan pajak, dan kepatuhan membayar pajak.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Responden dalam penelitian ini tersebar merata di lima wilayah, masing-masing 20 orang. Mayoritas adalah mahasiswa sebanyak 31%, dengan usia terbanyak 22–24 tahun sebesar 24%. Dari sisi jenis kelamin, responden didominasi perempuan sebesar 59%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif awal dan cukup melek terhadap kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. Kriteria Sampel Berdasarkan Domisili

No.	Domisili	Jumlah	Presentase
1.	Jakarta Pusat	20	20%
2.	Jakarta Timur	20	20%
3.	Jakarta Barat	20	20%
4.	Jakarta Selatan	20	20%
5.	Jakarta Utara	20	20%
Total		100	100

Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3. Setiap wilayah diwakili oleh 20 responden, yang merupakan 20% dari total sampel. Ini menunjukkan bahwa peneliti menerapkan pendekatan proporsional untuk memastikan setiap wilayah memiliki representasi yang seimbang dalam penelitian.

Tabel 4. Kriteria Sampel Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Mahasiswa	31	31%
2.	Wiraswasta	13	13%
3.	Pegawai Swasta	19	19%
4.	PNS	16	16%
5.	Lainnya	21	21%
Total		100	100%

Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4. Sebagian besar adalah mahasiswa, dengan jumlah 31 orang atau 31% dari total sampel. Selanjutnya, terdapat 19 responden yang bekerja sebagai pegawai swasta (19%), 16 responden sebagai pegawai negeri sipil (PNS) (16%), dan 13 responden yang berwirausaha (13%). Selain itu, terdapat kategori "Lainnya" yang mencakup 21 orang atau 21%.

Kategori "Lainnya" dalam penelitian ini mencakup jenis pekerjaan yang tidak termasuk dalam empat kategori utama yang telah disebutkan sebelumnya. Pekerjaan dalam kategori "Lainnya" meliputi ibu rumah tangga, pekerja lepas (*freelancer*), ojek online, pedagang kecil, buruh harian, dan profesi informal lainnya yang tidak memiliki ikatan kerja tetap dengan perusahaan atau instansi pemerintah.

Tabel 5. Kriteria Sampel Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1.	19-21	17	17%
2.	22-24	24	24%
3.	25-27	21	21%
4.	28-10	20	20%
5.	> 30	18	18%
Total		100	100%

Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 5. Kelompok usia yang paling banyak adalah rentang 22-24 tahun, dengan jumlah 24 orang atau 24% dari total sampel. Selanjutnya, terdapat 21 responden berusia 25-27 tahun (21%), 20 responden berusia 28-30 tahun (20%), 17 responden berusia 19-21 tahun (17%), dan sisanya, sebanyak 18 orang atau 18%, berasal dari kelompok usia di atas 30 tahun.

Distribusi usia ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam usia produktif, dengan konsentrasi tertinggi pada kelompok usia muda. Kelompok usia 22-24 tahun umumnya terdiri dari mahasiswa tingkat akhir atau individu yang baru memulai karir, sehingga pola kepatuhan mereka dalam membayar pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran generasi muda terhadap kewajiban perpajakan.

Tabel 6. Kriteria Sempel Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Perempuan	59	59%
2.	Laki-Laki	41	41%
	Total	100	100%

Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 6 diatas, responden dalam penelitian ini terdiri dari 59% perempuan dan 41% laki-laki dari total 100 responden. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Perbedaan jumlah antara responden perempuan dan laki-laki memberikan gambaran bahwa kepemilikan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi juga melibatkan partisipasi yang signifikan dari wajib pajak perempuan.

Tingginya partisipasi perempuan dalam penelitian ini mencerminkan bahwa kesadaran dan keterlibatan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya peran perempuan dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Pengaruh Kualitas Infrastruktur Jalan terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 7. Uji T (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constant)	28.437	2.693	—	10.560	<.001
Infra_X1	0.045	0.067	0.081	0.671	0.504
Pelayanan_X2	0.323	0.085	0.458	3.783	<.001

Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7. Menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan roda dua di Jakarta (sig. = 0,504 > 0,05). Meskipun responden menilai kondisi jalan baik, mereka tidak merasa hal tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban pajak. Ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman bahwa pajak yang dibayar berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Perlu adanya edukasi agar masyarakat menyadari pentingnya kontribusi pajak terhadap fasilitas publik.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sebaliknya, kualitas pelayanan pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (sig. < 0,001). Pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan mendorong masyarakat untuk lebih patuh karena mereka merasa dipermudah dan dihargai. Hal ini didukung pula oleh korelasi yang kuat antara variabel pelayanan dan kepatuhan. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kualitas layanan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Kualitas Infrastruktur Jalan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Secara Simultan

Tabel 8. Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	486.266	2	243.133	17.792	<.001 ^b
Residual	1325.524	97	13.665		
Total	1811.790	99			

Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan uji F pada tabel 8. Dapat disimpulkan bahwa variabel Infrastruktur (X1) dan Pelayanan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan (Y). Uji F menunjukkan bahwa secara simultan, infrastruktur jalan dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan roda dua, dengan nilai signifikansi yang sangat rendah (< 0,001). Meskipun secara parsial hanya kualitas pelayanan yang berpengaruh signifikan.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518 ^a	.268	.253	3.697

Diolah Peneliti (2025)

Dilanjutkan dengan 26,8% variasi dalam kepatuhan membayar pajak dijelaskan oleh kualitas infrastruktur dan pelayanan pajak dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini seperti tingkat pengetahuan wajib pajak, sanksi hukum, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di Kota Jakarta. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum melihat adanya keterkaitan langsung antara pajak yang mereka bayarkan dengan hasil nyata dalam bentuk perbaikan atau pemeliharaan jalan yang mereka gunakan sehari-hari. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya transparansi atau komunikasi yang efektif dari pemerintah mengenai pemanfaatan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap manfaat langsung dari pajak masih rendah, sehingga berdampak pada rendahnya dorongan internal untuk membayar pajak berdasarkan kondisi fisik jalan.

Sebaliknya, kualitas pelayanan pajak terbukti berpengaruh secara nyata terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasakan pelayanan yang ramah, cepat, dan informatif cenderung lebih sadar akan kewajiban perpajakannya serta lebih bersedia membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu. Pelayanan yang baik menciptakan pengalaman positif yang meningkatkan rasa percaya dan menghargai sistem perpajakan, sehingga mendorong perilaku taat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia dan pendekatan pelayanan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun infrastruktur tetap penting, pendekatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi publik lebih relevan dalam upaya membangun budaya patuh pajak. Kombinasi antara pelayanan yang prima dan komunikasi publik yang efektif mengenai fungsi dan manfaat pajak akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebaiknya diarahkan pada penguatan aspek pelayanan, transparansi, serta edukasi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Arif Sulistyo Wibowo, Siti Nurlaela, Y. C. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(April), 1304–1317.
- Damayanti, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). *Skripsi*.
- Laila Fatikhatul Ula, Dian Kusuma Wardani, B. W. (2021). *Sistem Pelayanan Pajak*. LPPM Universitas KH W Wahab Hasbullah.
- Mahasyahputra, B. A., Wulandari, P., Maharani, E. D., Rahman, A. H., & Sahara, S. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Logistik Jakarta dengan Papua. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 208–216.
- Manrejo, S. (2023). Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan. In *Cv. Aa. Rizky* (Issue August).
- Ridhawati, R., Lesmanawati, D., & Lufty, A. P. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Banjarmasin 1. *Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v15i1.363>
- Syawali, A., & Machdar, N. M. (2024). Kontribusi Kesadaran, Self Assessment, Dan Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 865–875. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1653>